

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dari dalam negeri yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan berperan sangat penting terutama pada masa pemulihan keadaan ekonomi. Mengingat begitu besarnya peranan dari pajak sebagai sumber penerimaan negara maka perlu untuk diamankan dan ditingkatkan, baik melalui identifikasi pemungutan pajak maupun ekstentifikasi Wajib Pajak. Maka, selayaknya Kantor Pelayanan Pajak melengkapi dirinya dengan struktur pengendalian yang baik. Masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah “Peranan Struktur Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana struktur pengendalian internal berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, yang dilakukan pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa fakta sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti dan menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam skripsi ini, penulis telah mengambil hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat hubungan yang signifikan antara struktur pengendalian internal terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”.

Untuk pengujian hipotesis tersebut, maka penulis melakukan pengujian statistik dengan metode Standar Deviasi terhadap data rencana dan realisasi besarnya pajak yang diterima Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Berdasarkan hasil pengolahan data, perhitungan statistik dengan menggunakan metode Standar Deviasi diperoleh t hitung $3,493 > t$ tabel level of significance $0,05$ $df = 23 = 2,069$ (Terdapat perbedaan signifikan antara struktur pengendalian internal terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur penegndalian internal pada KPP Pratama Bandung Bojonagara sudah cukup memadai, walaupun penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan belum mencapai rencana, dan penurunan penerimaan dari tahun 2006 ke tahun 2007 disebabkan adanya aturan WP Badan yang harus pindah ke KPP Madya.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Lokasi Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan.....	13
2.2 Pengertian Pengendalian.....	13
2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern.....	14
2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern.....	15
2.2.3 Komponen Pengendalian Intern.....	16

2.2.4	Keefektifan Pengendalian Intern.	18
2.2.5	Keterbatasan Pengendalian Intern.	19
2.3	Pengertian Pajak.	21
2.3.1	Definisi Pajak.	21
2.3.2	Fungsi Pajak.	23
2.3.3	Pengelompok Pajak.	23
2.3.4	Asas Pemungutan Pajak.	25
2.3.5	Sistem Pemungutan Pajak.	26
2.3.6	Syarat Pemungutan Pajak.	27
2.3.7	Stelsel Pajak.	29
2.3.8	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.	30
2.3.9	Hambatan Pemungutan Pajak.	31
2.4	Pajak Penghasilan.	32
2.4.1	Subjek Pajak Penghasilan.	33
2.4.2	Objek Pajak Penghasilan.	36
2.5	Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.	41
2.5.1	Subjek Pajak Penghasilan Badan.	41
2.5.2	Objek Pajak Penghasilan Badan.	42
2.5.3	Tarif Pajak Penghasilan Badan.	46

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian.	48
3.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Bojonagara.	48

3.1.2	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Bandung Bojonagara.	52
3.1.3	Struktur Organisasi KPP Paratama.	53
3.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara.	57
3.2	Metode Penelitian.	58
3.2.1	Pengumpulan Data.	58
3.2.2	Tehnik Pengumpulan Data.	59
3.2.3	Rancangan Analisis Pengujian Hipotesis	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.	63
4.1.1	Pendafatran Wajib Pajak Badan.	63
4.1.2	Pembayaran Pajak.	67
4.1.2.1	Proses Pencatatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	68
4.1.3	Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).	69
4.1.3.1	SPT Masa.	70
4.1.3.2	SPT Tahunan.	73
4.2	Upaya-upaya pengamanan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bojonagara.	77
4.2.1	Peranan Struktur Pengendalian Internal Terhadap	

Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bojonagara.	80
4.2.2 Data-data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bojonagara.	86
4.2.3 Perhitungan Statistik.	88
4.2.4 Kelemahan-kelemahan Yang Ditemukan dalam Struktur Pengendalian Internal KPP dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.	90
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.	93
5.2 Saran.	94
 DAFTAR PUSTAKA.	 96

DAFTAR TABEL

Hal.		
Tabel 2.1	Kelompok Laporan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak.	47
Tabel 4.1	Perbandingan Total Realisasi Tahun 2006 dan 2007.	86
Tabel 4.2	Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2006.	86
Tabel 4.3	Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2007.	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Flow Chart Penerimaan Pajak
- SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
- SSP PPh Badan
- Berita Acara Bimbingan
- Form Penelitian di KPP Pratama Bandung Bojonagara